

**ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2003-2012**

Ruslinda Agustina
ruslindaagustinaF@yahoo.com
Rina Arliani
rinaarliani91@yahoo.com

STIE NASIONAL BANJARMASIN

Abstract,

This research aimed to examine the effect of the contribution of the PKB and BBNKB to PAD in South Kalimantan province in 2003-2012.

The method used quantitative methods, namely measurement of objective statistical data and through SPSS version 16.

The results of the test or test the hypothesis partially explains PKB t affect the PAD, while BBNKB no effect on the South Kalimantan provincial PAD period 2003-2012. The results of hypothesis testing simultaneously or PKB and BBNKB F test against provincial PAD berpengaruh South Kalimantan period 2003-2012. the results of the regression estimates indicate that there are two independent variables in the regression model is able to explain 64% of the revenue and the balance of 36% is explained by other variables not included in this study.

Keywords : PKB, BBNKB and PAD

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kontribusi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003-2012.

Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif, yaitu pengukuran data dan statistik objektif melalui SPSS versi 16. Hasil penelitian dari pengujian hipotesis secara parsial atau uji t menjelaskan PKB berpengaruh terhadap PAD, sedangkan BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012.

Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan atau uji F PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang ada pada model regresi mampu menjelaskan 64%

terhadap PAD dan sisanya sebesar 36% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : PKB, BBNKB dan PAD

Pemerintah daerah (PEMDA) mempunyai kewenangan atas pendapatan asli daerah (PAD) yaitu untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Adanya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan

penerimaan sumber penerimaan dari pajak daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang hasil dari penerimaannya akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota dengan sistem bagi hasil. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor. Tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor, maka makin tinggi pula pajak yang akan dibebankan kepada pemiliknya. Hal itu juga menyebabkan peningkatan sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor PKB. Pengelolaan hasil dari penerimaan daerah ini juga perlu diawasi dan dikontrol dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan

terutama pengalokasiannya. Alasan peneliti ini adalah fokus pada PKB dan BBNKB, karena semakin meningkatnya populasi kendaraan bermotor dan jual beli kendaraan bekas di provinsi Kalimantan Selatan yang akan berdampak bagi penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian Mariani (2010) menunjukkan bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD dan sebaliknya bahwa BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD, sedangkan secara bersama-sama PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD di provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2005-2009. Sementara hasil temuan Santi (2008) menunjukkan bahwa bahwa PKB dan BBNKB secara parsial berpengaruh terhadap PAD sedangkan secara bersama-sama PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD di provinsi Kalimantan Timur periode 2003-2007. Hasil temuan Yuli (2010) menunjukkan bahwa PKB tidak berpengaruh terhadap PAD dan sebaliknya BBNKB berpengaruh

terhadap PAD sedangkan secara bersama-sama PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD di provinsi Lampung periode tahun 2005-2009. Belum ada penelitian lebih lanjut yang meneliti pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD di provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2003-2012, sehingga belum terkonfirmasi pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD di provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2003-2012 secara simultan.

Berdasarkan masalah di atas mendorong penulis melakukan penelitian tentang analisis pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD di provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2003-2012. Apabila tidak ada penelitian lebih lanjut yang meneliti PKB dan BBNKB terhadap PAD di provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012, maka pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan tidak mengetahui pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD di provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2003-2012 sehingga informasi yang diperoleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan PAD tidak akurat.

Menurut UU No 34 Tahun 2000 “Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”, sedangkan PPRI Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah menyebutkan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak daerah berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : (1) Pajak provinsi terdiri dari : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan

pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. (2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan UU tersebut adalah : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. UU Nomor 34 tahun 2000 merupakan perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. PP Nomor 65 tahun 2001 tentang peraturan pajak daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat seperti kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah Bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh

Gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

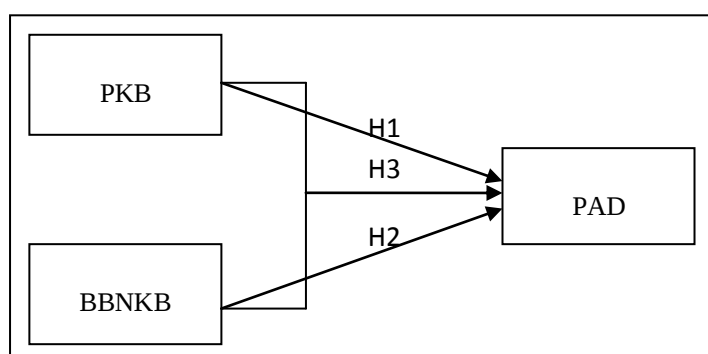
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Objek pajak BBNKB adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor akibat dari perjanjian dua pihak atau sepihak, pemasukan dari luar negeri untuk dipakai, keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukan ke badan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran BBNKB dilakukan pada

saat pendaftaran. Wajib pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak saat penyerahan.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu seperti Mariani (2010), Santi (2008), Yuli

(2010), Elfanta (2014) serta Sari (2013) maka rumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H_1 = PKB berpengaruh terhadap PAD; H_2 = BBNKB berpengaruh terhadap PAD; H_3 = PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD secara simultan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Km 5 Kota Banjarmasin. Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pengaruh dan kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain berupa data primer yaitu

penerapan kontribusi PKB dan BBNKB yang dilakukan Dinas Pendapatan provinsi Kalimantan Selatan dan data sekunder yaitu berupa biaya pengelolaan, data target dan realisasi pendapatan asli daerah serta data mengenai objek PKB dan BBNKB. Sumber data tersebut diperoleh dari bagian administrasi di Dinas Pendapatan provinsi Kalimantan Selatan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *Statistik Product and Service Solution* (SPSS 16).

Variabel independen pada penelitian ini adalah PKB dan BBNKB dan variabel dependen pada penelitian ini adalah PAD. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini yaitu : uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Persamaan model regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n + e$$

Keterangan :

Y = PAD

X1 = PKB

X2 = BBNKB

b 1..... b2 = Koefisien regresi, α = konstanta,

e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil data PKB dan BBNKB dari Dinas Pendapatan provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2003-2012.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKB	10	.21	.34	.2660	.04377
BBNKB	10	.11	.19	.1520	.02530
PAD	10	4.72E11	4.38E12	1.8904E12	1.21940E12
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Output Statistik SPSS

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa analisis statistik deskriptif dari variabel PKB menunjukkan bahwa selama periode penelitian, variabel PKB memiliki nilai terendah sebesar 0,21 yang menunjukkan nilai terendah dari PKB selama tahun pengamatan. Nilai tertinggi PKB sebesar 0,34 yang menunjukkan nilai tertinggi dari PKB selama tahun pengamatan yaitu pada tahun 2005.

Nilai rata-rata (*Mean*) PKB secara keseluruhan adalah sebesar 0,2660, menggambarkan bahwa setiap tahunnya selalu menghasilkan nilai PKB positif. Nilai standar deviasi sebesar 0,04377 menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, kondisi PKB berfluktuasi, rata-rata jarak antara PKB dan PAD tinggi dan positif cukup jauh dengan rata-rata

antara laba dan PKB dan PAD rendah.

Variabel BBNKB memiliki nilai terendah sebesar 0,11 pada tahun 2004, sedangkan nilai tertinggi BBNKB sebesar 0,19 yang menunjukkan nilai tertinggi dari BBNKB pada tahun 2003. Nilai rata-rata (*Mean*) BBNKB yang dihasilkan secara keseluruhan adalah sebesar 0,1520, menggambarkan bahwa setiap tahunnya selalu menghasilkan nilai BBNKB positif. Nilai standar deviasi 0,02530 menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, kondisi BBNKB berfluktuasi, rata-rata jarak antara BBNKB dan PAD tinggi dan positif cukup jauh dengan rata-rata antara laba dan BBNKB dan PAD rendah.

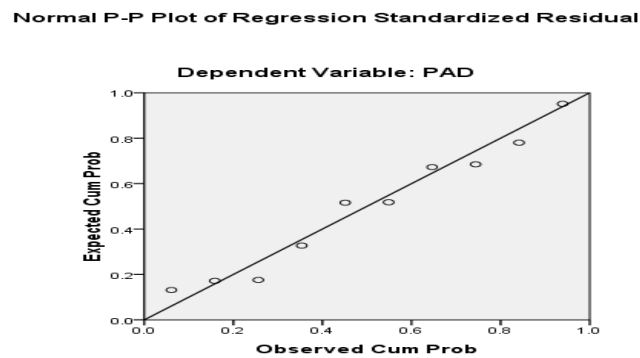
Analisis statistik deskriptif dari variabel PAD menunjukkan bahwa selama periode penelitian, variabel ini memiliki nilai terendah

sebesar Rp 471.673.988.427,- yang menunjukkan nilai terendah dari PAD pada tahun 2003, sedangkan nilai tertinggi PAD yaitu sebesar Rp 4.380.309.776.377,- pada tahun 2012. Nilai rata-rata (*Mean*) PAD yang dihasilkan secara keseluruhan sebesar Rp 1.890.404.358.331,- menggambarkan bahwa setiap tahunnya selalu menghasilkan nilai PAD positif. Nilai standar deviasi Rp 1.219.404. 358.331,- menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, kondisi PAD berfluktuasi.

Pengujian Asumsi Klasik

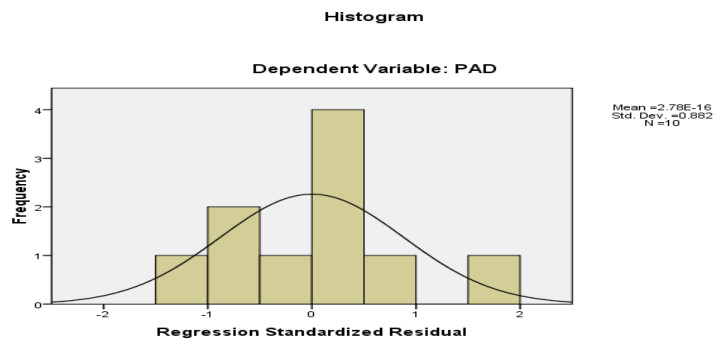
a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *Normal Probability Plot*, Grafik histogram dan tabel *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yang disajikan di bawah ini :



Gambar 2. Uji Normalitas
Sumber : *Output Statistik SPSS*

Grafik histogram tersebut data yang diolah telah memenuhi membentuk pola distribusi normal, persyaratan normalitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa



Gambar 3. Uji Normalitas
Sumber : *Output Statistik SPSS*

Metode yang lebih akurat dari kedua model di atas adalah dengan uji normalitas menggunakan

Kolmogorov Smirnov. Berikut ini hasil uji *Kolmogorov Smirnov* disajikan pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Standardized Residual
N	10
Normal Parameters ^a Mean	.0000000
Std. Deviation	.88191710
Most Extreme Absolute Differences	.151
Positive	.151
Negative	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z	.479
Asymp. Sig. (2-tailed)	.976

Sumber : Output Statistik SPSS

Berdasarkan *output* pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,976. Nilai tersebut lebih dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikorelinieritas pada antar variabel independen terjadi jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Tabel 3. Uji Multikorelinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 PKB	.375	2.669
BBNKB	.375	2.669

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Statistik SPSS

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* kedua variabel > 0,10 dan nilai VIF < 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antara variabel PKB dan BBNKB.

c. Uji Autokorelasi

Uji *Durbin-Watson* sebesar 1,153 yang berarti nilai tersebut berada diantara -2 sampai dengan 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

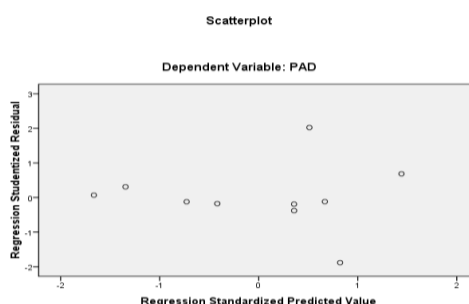
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.800 ^a	.640	.537	8.30021E11	1.153

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Statistik SPSS

- d. Uji Heteroskedastisitas ZPRED dengan residualnya SRESID. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini :
- Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat *grafik plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu



Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output Statistik SPSS

Berdasarkan grafik plot dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab grafik plot tidak membentuk pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan tidak

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan model regresi layak dipakai.

Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi linear berganda tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.788E12	1.787E12		3.800	.007
PKB	-3.087E13	1.033E13	-1.108	-2.989	.020
BBNKB	2.180E13	1.787E13	.452	1.220	.262

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Statistik SPSS

Berdasarkan hasil pengujian penelitian secara parsial pada tabel 5 di atas diperoleh nilai signifikansi variabel PKB sebesar 0,020, lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD pada Dinas Pendapatan provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2012. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2008) yang menyatakan bahwa PKB mempunyai pengaruh terhadap PAD, sehingga H1 yang menyatakan bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD dapat diterima. Secara rasionalisasi, jika PKB meningkat maka PAD juga akan meningkat. Sebaliknya, PKB yang semakin turun setiap tahunnya tentunya akan diikuti PAD yang semakin turun. Hal di atas

mengindikasikan bahwa secara rasionalisasi PKB berpengaruh positif terhadap PAD, karena PKB merupakan pajak tahunan yang diterima pemerintah provinsi. Semakin tinggi PKB ini maka semakin baik dalam mengelola PAD. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan kinerja pemerintah provinsi. Peningkatan kinerja pemerintah provinsi menjadikan pemerintah tersebut makin memiliki nilai positif dari pemerintah pusat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012 diperoleh hasil yang menyatakan bahwa PKB memiliki pengaruh terhadap PAD. PKB berpengaruh terhadap PAD diterima karena memiliki nilai lebih kecil dari

0,05. Hal ini disebabkan jumlah motor di provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan setiap tahun pemilik motor wajib membayar PKB sehingga PKB tersebut merupakan penghasilan utama yang mempengaruhi besar kecilnya PAD. Meskipun, PKB provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya meningkat tetap perlu diperhatikan pemungutan sumber penerimaan tersebut. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PKB yaitu pengetatan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dan perbaikan sistem administrasi perpajakan untuk mampu memenuhi target penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian secara parsial pada tabel 5 di atas diperoleh nilai signifikansi variabel BBNKB sebesar 0,262 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD pada Dinas Pendapatan provinsi

Kalimantan Selatan periode 2009-2012. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2010) yang menyatakan bahwa BBNKB tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD tidak dapat diterima. Secara rasionalisasi, jika pajak BBNKB meningkat maka PAD juga akan meningkat. Sebaliknya, BBNKB yang semakin turun setiap tahunnya tentunya akan diikuti PAD yang semakin turun. Hal di atas mengindikasikan bahwa secara rasionalisasi BBNKB berpengaruh positif terhadap PAD, karena BBNKB merupakan biaya balik nama saat peralihan kepemilikan kendaraan bermotor yang diterima pemerintah provinsi. Semakin tinggi BBNKB ini maka semakin baik dalam mengelola PAD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012 diperoleh hasil yang menyatakan bahwa BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal ini terjadi karena BBNKB merupakan

biaya balik nama saat peralihan kepemilikan atau jual beli kendaraan bermotor sehingga penerimaan BBNKB kadang naik dan kadang turun berdasarkan jual beli yang terjadi setiap tahun. Sehingga BBPNKB dipengaruhi besarnya penjualan kendaraan motor.

H2 yaitu BBNKB berpengaruh PAD ditolak karena memiliki nilai lebih besar 0,05. Hal ini disebabkan jumlah motor di provinsi Kalimantan Selatan besar namun pendapatan BBNKB menyumbang PAD masih kecil. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan BBNKB dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan kepada perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan pada penggunaan dan pengembangan sistem baru dan sistem yang sudah ada. Jenis ekstensifikasi yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan BBNKB adalah pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan dinas pelat merah sedangkan intensifikasi pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan razia kendaraan bermotor secara berkala untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan pelunasan kewajiban pajak kendaraan.
- 2) Pembuatan Samsat *on line*, di mana dapat mempermudah wajib pajak/pemilik kendaraan dalam membayar kewajiban pajaknya melalui sistem komputerisasi.
- 3) Pengadaaan Samsat keliling, akan mempermudah wajib pajak/pemilik kendaraan untuk dapat membayar kewajiban pajaknya dengan membuka stand pembayaran di tempat-tempat strategis tanpa perlu datang ke kantor Samsat.
- 4) Pemberian surat teguran kepada wajib pajak/pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.560E24	2	4.280E24	6.212	.028 ^a
	Residual	4.823E24	7	6.889E23		
	Total	1.338E25	9			

a. Predictors: Constant), BBNKB, PKKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Statistik SPSS

Berdasarkan Uji ANOVA pada tabel 6 di atas, diperoleh angka signifikansi $0,028 < 0,05$ maka H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PKB dan BBNKB berpengaruh secara simultan terhadap PAD.

Uji Determinasi

Uji determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.800 ^a	.640	.537	8.30021E11	1.153

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Statistik SPSS

Angka *R Square* (R^2) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,640 yang menunjukkan sumbangan pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD sebesar 64% sedangkan sisanya sebesar 36% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012 karena jumlah motor di provinsi

Kalimantan Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012 karena jumlah motor di provinsi Kalimantan Selatan besar namun pendapatan BBNKB menyumbang PAD masih kecil. Sehingga meskipun jumlah motor yang beredar di jalan banyak namun besarnya BBNKB tergantung transaksi jual beli motor dan BBNKB tidak memiliki pengaruh PAD.
3. Hasil pengujian hipotesis secara simultan atau uji F PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012.

Saran

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan dan berupaya meningkatkan penerimaan PKB karena penerimaan PKB provinsi Kalimantan Selatan memiliki pengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan

Selatan dengan cara pengetatan sanksi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

2. Meskipun BBNKB tidak terbukti berpengaruh terhadap PAD, pemerintah masih perlu meningkatkan penerimaan BBNKB dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Jenis ekstensifikasi pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan dinas pelat merah hal ini dapat meningkatkan objek pajak sekaligus pendapatan pajak, sedangkan intensifikasi pajak yang dapat dilakukan dengan razia kendaraan bermotor secara berkala, pembuatan samsat *on line*, dan pemberian surat teguran kepada wajib pajak/pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti pajak daerah dan retribusi sehingga dapat diketahui apakah penerimaan daerah yang lainnya mempengaruhi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfanta, M. Fayrusz, Citrasudi.
(2014). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Skripsi)*
- Mariani, (2010). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Makasar: Universitas Hasanuddin (Skripsi)*
- Provinsi Kalimantan Selatan,
Peraturan Daerah tahun 2009 tentang tugas pokok dinas pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.*
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan pusat dan daerah.
- , Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Santi, (2008). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Timur. Malang: Universitas Muhammadiyah (Skripsi)*
- Sari, Tri, Mustika, (2013). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.*
- Suliyanto, (2009). *Step By Step Cepat Menguasai SPSS. Jakarta: Bumi Askara.*
- Yuli, (2010). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Lampung. Lampung: Universitas Lampung (Skripsi)*
- www. wikipedia.org/wiki/potensi_diri. Pukul 11.30 WITA Hari Minggu Tanggal 20 April 2014.

